

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Saat ini, teknologi komunikasi dan informasi merupakan suatu yang tidak asing bagi kita. Manusia membutuhkan informasi karena informasi merupakan hal yang tidak kalah penting dengan kebutuhan sandang dan pangan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perkembangan di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini membantu manusia dalam penyampaian informasi yang cukup luas dan cepat. Sehingga untuk mendapatkan informasi dapat diakses di mana pun dan kapan pun dengan mudah dan biaya yang murah (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2016). Salah satu perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kebutuhan data dan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan kebutuhan bisnis yang berjalan. Untuk mengelola data dan informasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dibutuhkan suatu terobosan yang dapat digunakan untuk mengelola kebutuhan data dan informasi yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan pengembangan sistem yang berbasis teknologi dan informasi. Dengan kondisi seperti itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya mengimbangi kondisi saat ini dengan membuat suatu sistem informasi meskipun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Akibatnya integrasi data yang tidak baik dapat mengganggu dalam pencapaian tujuan perusahaan yaitu efisiensi dan efektivitas untuk pemenuhan kebutuhan organisasi (Kasenda&Nugroho&Sulistyo, 2014). Untuk melakukan pengembangan sistem informasi yang perlu dilakukan adalah suatu perancangan sistem informasi. Perancangan sistem informasi yang perlu diperhatikan antara lain : arsitektur bisnis, arsitektur data dan arsitektur teknologi. Sistem informasi yang baik akan menunjang pencapaian visi dan misi di suatu perusahaan (Dyna&Mustafid&Beta, 2012).

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau biasa disingkat Pemrov Jabar adalah salah satu dari sekian banyak instansi pemerintahan yang sudah menggunakan TI dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, meskipun TI yang digunakan merupakan TI yang bersifat eksternal yang dimiliki oleh semua jajaran pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah atau kota. Penetapan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah, bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 6 ayat (1) Tentang kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Untuk melakukan identifikasi mengenai fungsi bisnis pemerintahan, dilakukan berdasarkan referensi yang terdapat pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri urusan pemerintahan absolut ini, atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan absolut ini dapat meliputi a) Politik Luar Negeri Pertahanan b) Keamanan c) Yustisi d) Moneter dan Fiskal Nasional e) Agama

Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada pemerintah daerah, urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan pada beberapa Perangkat Daerah (PD).

Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu a) Pendidikan b) Kesehatan c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman e) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat f) Sosial.

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut a) Tenaga kerja b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c) Pangan d) Pertanahan e) Lingkungan hidup f) Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana i) Perhubungan j) Komunikasi dan Informatika k) Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah l) Penanaman Modal m) Kepemudaan dan Olahraga n) Statistik o) Persandian p) Kebudayaan q) Perpustakaan r) Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, yang terdiri dari a) Kelautan dan Perikanan b) Pariwisata c) Pertanian d) Kehutanan e) Energi dan Sumber Daya Mineral f) Perdagangan g) Perindustrian h) Transmigrasi.

Dalam pelaksanaan fungsi bisnis organisasi pemerintah daerah, terdapat beberapa fungsi yang bersifat umum diberlakukan dan mendukung proses bisnis yang dijalankan keseluruhan Perangkat Daerah (PD) yaitu meliputi a) Administrasi Pemerintahan b) Penyusunan Kebijakan c) Perencanaan dan Penganggaran d) Keuangan, Manajemen Aset dan Pengelolaan Pendapatan e) Pengadaan f) Kepegawaian g) Pemantauan dan Evaluasi h) Pengawasan.

Salah satu ilmu yang dapat menyelaraskan proses bisnis dan kebutuhan organisasi akan TI untuk mencapai *goals* perusahaan adalah *enterprise architecture* atau EA. *Enterprise architecture* adalah proses menerjemahkan visi dan strategi suatu bisnis ke perubahan yang lebih efektif dengan cara membuat, mengomunikasikan, dan meningkatkan kebutuhan kunci, prinsip dan model yang mendeskripsikan keadaan perusahaan pada masa depan dan memastikan perusahaan untuk berevolusi menjadi lebih baik (Wikipedia, 2017). *Enterprise architecture* akan menghasilkan *output* sebuah *blueprint* (cetak biru) berupa usulan rancangan dan pemodelan sistem informasi yang tepat dan sesuai antara penerapan

sistem informasi dengan kebutuhan organisasi. Di dalam kajian ilmu *enterprise architecture*, terdapat banyak *framework* yang dapat digunakan, diantaranya adalah TOGAF ADM, *Zachman Framework*, TEAF, Gartner, DODAF, dan FEAF. Pada penelitian yang dilakukan untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini, *framework* yang digunakan adalah TOGAF ADM. *Framework* ini dipilih karena perancangan dan pemodelan yang ada di dalamnya telah lengkap untuk menggambarkan sistem informasi untuk kebutuhan organisasi. Dengan adanya perencanaan yang matang, penerapan TI diharapkan akan menghasilkan luaran yang seoptimal mungkin pula. *Enterprise architecture* akan menjadi dasar bagi sebuah perusahaan dalam investasi dan implementasi TI, mengurangi beberapa resiko yang timbul dari implementasi TI, dan dapat menjadi parameter untuk meninjau kembali performa implementasi TI pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Enterprise architecture* yang baik memungkinkan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara efisiensi TI dan inovasi bisnis. Hal ini memungkinkan unit bisnis individu untuk berinovasi dengan aman dalam mengejar keuntungan kompetitif mereka. Pada saat yang sama, ini memastikan kebutuhan organisasi untuk strategi TI terpadu terpenuhi, memungkinkan sinergi terdekat di seluruh penghargaan masuk yang diperpanjang (The Open Group 2009-2011, 2011).

Satu Data Indonesia merupakan sebuah inisiatif pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. Satu Data digunakan untuk mengambil kebijakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan dengan pengambilan data (Satu Data Indonesia, 2018). Satu Data menggunakan prinsip data terbuka dalam merilis data, dimana data tersedia dalam format terbuka yang mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. *Open Data* (Data Terbuka) Data terbuka adalah data yang dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan, dan didistribusikan kembali oleh siapapun tanpa syarat, kecuali dengan mengutip sumber dan pemilik data. Selain itu, seluruh data yang dipublikasikan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya pada Satu Data dalam menjalankan

tugasnya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapinya, seperti : pada data yang tersimpan pada sistem Satu Data masih belum tentu dinyatakan sebagai data yang *valid*.

Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan penataan strategi instansi yang ada disana. Sehingga perlu dibuat suatu perancangan suatu teknologi informasi dengan operasional instansi yang berupa IT *Roadmap* yang dapat digunakan dan diimplementasikan supaya dapat tercapainya tujuan dari perusahaan. Oleh karena itu, penulis merancang teknologi informasi pada sistem Satu Data dengan menggunakan *enterprise architecture*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana usulan rancangan *enterprise architecture* dengan menggunakan TOGAF ADM pada fungsi wajib berkaitan pelayanan dasar di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana usulan rancangan *blueprint* menggunakan TOGAF ADM pada fungsi wajib berkaitan pelayanan dasar di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan perumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan kerangka model yang berupa *blueprint* rancangan *enterprise architecture* di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar terciptanya integrasi data sehingga dapat menunjang strategi instansi.
2. Menyediakan rancangan *blueprint* pada fungsi wajib berkaitan pelayanan dasar di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggunakan TOGAF ADM.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini :

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi untuk melihat keterbukaan dan transparansi data sehingga dapat membantu dalam penyusunan strategi instansi salah satunya dalam keamanan informasi data. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah rancangan arsitektur Satu Data pada fungsi wajib berkaitan pelayanan dasar yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang dan juga untuk kepentingan operasional dan kesesuaian terhadap regulasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat luas untuk memberikan keterbukaan informasi publik, pengetahuan tentang karya ilmiah, menambah minat baca, dan memahami pembuatan karya ilmiah, dan penjelasan yang sederhana mengenai pentingnya kesadaran informasi dalam penerapan *enterprise architecture* di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Tim *Enterprise Architecture*

Mempermudah penyusunan *Enterprise Architecture*

4. Bagi Penulis

- a. Memberikan usulan rancangan *enterprise architecture* di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar terciptanya integrasi data sehingga dapat menunjang strategi instansi.
- b. Memberikan usulan rancangan *enterprise architecture* agar arahan strategi instansi yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat sinergi dengan sistem informasi yang ada pada instansi.
- c. Memberikan usulan berupa *IT roadmap* dan *blueprint* yang dapat digunakan untuk panduan dalam pembangunan *enterprise architecture* di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

I.5 Batasan Penelitian

Dalam kajian ini berfokus pada pembuatan rancangan *enterprise architecture* dengan menggunakan TOGAF ADM. Pada TOGAF ADM penulis membatasi fase yang dikerjakan antara lain:

1. Menganalisis dan melakukan perancangan *enterprise architecture* dimulai dari tahap fase *preliminary*, fase *architecture vision*, fase *business architecture*, dan fase *information system architecture* yang meliputi *data architecture* dan *application architecture*, dan *technology architecture*. Sedangkan untuk fase *opportunities and solutions*, fase *migration planning*, fase *implementation governance*, fase *architecture change management* tidak dibahas.
2. Penelitian ini hanya membahas pada tahap analisis dan perancangan *enterprise architecture* untuk Satu Data pada fungsi wajib berkaitan pelayanan dasar di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

I.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan kajian ini dikelompokkan menjadi beberapa pembahasan dengan sistematika penulisan. Berikut merupakan sistematika penulisan dari penyusunan kajian:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai dasar pemikiran dari penelitian yang dilakukan. Dimulai dari masalah yang diangkat mengenai penyelarasan data dalam meningkatkan transparansi data oleh Satu Data di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi, sehingga membutuhkan perancangan *enterprise architecture* yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Bab ini terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, menjelaskan tentang penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya serta kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. Bab ini juga membahas arsitektur

referensi yang berisikan data pada beberapa Instansi untuk menyelaraskan data yang kurang tepat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai metode pengumpulan data yang digambarkan oleh sebuah model konseptual yang menjelaskan konsep secara terstruktur dari penelitian serta menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bab ini juga berisi sistematika penelitian yang menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV PERSIAPAN DAN IDENTIFIKASI

Dalam bab ini, terdiri dari dua fase yaitu fase persiapan dan fase identifikasi. Fase persiapan menjelaskan tentang pengumpulan kebutuhan data, dan fase identifikasi menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, gambaran umum organisasi, visi dan misi organisasi, rencana strategi, struktur organisasi, identifikasi bisnis, identifikasi data, tujuan perusahaan, *value* perusahaan, rencana kerja dan anggaran, identifikasi aplikasi, proses bisnis utama, kondisi aplikasi *existing*, dan juga permasalahan *existing*.

BAB V PERANCANGAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, memberikan gambaran perancangan *enterprise architecture* dengan fokus kepada fungsi wajib berkaitan pelayanan dasar di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggunakan *framework* TOGAF ADM dari *preliminary phase*, *architecture vision*, *business architecture*, *information system architecture* dan *technology architecture*.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, memberikan kesimpulan mengenai perancangan *enterprise architecture* dengan fokus kepada fungsi wajib berkaitan pelayanan dasar di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan *framework* TOGAF ADM dengan Sistem Satu Data serta saran yang diberikan untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya.